



Reformasi Klasifikasi Liabilitas dan Ekuitas dalam Akuntansi Keuangan: Kajian Literatur

Ihsan Tiara*, Fadillah Janadiyah, Dea Natalia Sembiring, Jufri Darma

Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Uversitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V Medan Estate

Korespondensi: ihsantiara2127@gmail.com*

Abstract. *Liability and equity classification is a critical issue in financial accounting because it impacts a company's capital structure, transparency, and risk assessment. Dual-purpose financial instruments, such as preferred stock and convertible bonds, often create confusion in determining a company's financial position. This study examines the developments, challenges, and classification efforts, focusing on international standards (IFRS/IAS 32) and the implementation of their reforms in Indonesian PSAK. The method used is a narrative review based on academic literature and accounting standards for the 2015–2025 period. The study results indicate inconsistencies across countries that affect the quality of financial reports and investor assessments. The Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE) project developed by the IASB is an important step towards improving clarity and consistency. Therefore, liability and equity classification reform is needed to reduce investor confusion, improve reporting quality, and support the efficiency of global capital markets.*

Keywords: *Liabilities, equity, accounting reform, ifrs, hybrid instruments, financial reporting*

Abstrak. Klasifikasi liabilitas dan ekuitas merupakan isu penting dalam akuntansi keuangan karena berpengaruh pada struktur modal, transparansi, dan penilaian risiko perusahaan. Instrumen keuangan yang memiliki sifat ganda, seperti saham preferen dan obligasi konversi, sering menimbulkan kebingungan dalam menentukan posisi keuangan perusahaan. Kajian ini menelaah perkembangan, tantangan, dan upaya klasifikasi dengan fokus pada standar internasional (IFRS/IAS 32) serta penerapan reformasinya dalam PSAK di Indonesia. Metode yang digunakan adalah naratif review berdasarkan literatur akademik dan standar akuntansi periode 2015–2025. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antarnegara yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan penilaian investor. Proyek Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE) yang dikembangkan IASB menjadi langkah penting untuk memperbaiki kejelasan dan konsistensi. Dengan demikian, reformasi klasifikasi liabilitas dan ekuitas diperlukan guna mengurangi kebingungan investor, meningkatkan kualitas pelaporan, serta mendukung efisiensi pasar modal global.

Kata kunci: Liabilitas, Ekuitas, Reformasi Akuntansi, IFRS, Instrumen Hibrida, Pelaporan Keuangan

LATAR BELAKANG

Klasifikasi liabilitas dan ekuitas merupakan aspek penting dalam akuntansi keuangan karena menentukan bagaimana struktur modal perusahaan disajikan dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Berdasarkan IAS 32 yang diadopsi dalam PSAK 50, liabilitas adalah instrumen keuangan yang menimbulkan kewajiban kontraktual bagi perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak ketiga, atau ketika perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari kewajiban tersebut (IASB, 2018). Dengan kata lain, liabilitas mencerminkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas. Sebaliknya, ekuitas diartikan sebagai klaim residual

Received September 09, 2025; Revised September 15, 2025; Accepted September 22, 2025

**Corresponding author, e-mail address*

pemilik setelah seluruh kewajiban diselesaikan, yaitu hak kepemilikan atas sisa aset perusahaan. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020), ekuitas juga mencerminkan posisi pemilik dalam menanggung risiko sekaligus memperoleh manfaat dari kinerja perusahaan.

Penentuan klasifikasi liabilitas dan ekuitas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak besar terhadap pengukuran rasio keuangan, pemenuhan struktur modal minimum, serta indikator kesehatan keuangan yang digunakan investor, kreditor, dan regulator. Permasalahan muncul ketika instrumen keuangan bersifat ganda atau hybrid. Misalnya, saham preferen dengan dividen tetap sering diperlakukan sebagai liabilitas karena ada kewajiban pembayaran dividen secara berkala, namun juga memiliki sifat ekuitas karena mencerminkan kepemilikan. Hal serupa berlaku pada obligasi konversi, yang dapat dicatat sebagai liabilitas, ekuitas, atau kombinasi keduanya, tergantung pada syarat kontrak dan fitur konversinya (Barth & Landsman, 2018; Zhang & Andrew, 2019).

Dalam praktiknya, perbedaan kecil dalam klausul kontrak seperti hak penembusan awal, opsi dividen kumulatif, atau mekanisme konversi tetap maupun variabel dapat menghasilkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Akibatnya, dua instrumen dengan substansi ekonomi serupa dapat dilaporkan berbeda dalam neraca: satu sebagai liabilitas, sementara yang lain sebagai ekuitas, hanya karena perbedaan teknis kontraktual. Kondisi ini berpengaruh terhadap rasio keuangan penting seperti leverage, return on equity (ROE), dan debt-to-equity ratio, yang digunakan pasar untuk menilai risiko serta pengambilan keputusan investasi (Hasymi & Garayuni, 2024).

Ketidakpastian klasifikasi ini menurunkan tingkat keterbandingan (*comparability*) laporan keuangan antarperusahaan maupun antaryurisdiksi. Investor dan analis pasar menghadapi kesulitan dalam mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan secara konsisten, sedangkan regulator mengalami hambatan dalam menciptakan pelaporan yang seragam. Situasi ini juga mendorong terjadinya arbitrase akuntansi, yaitu ketika perusahaan merancang instrumen keuangan untuk memanfaatkan kelemahan standar sehingga kondisi keuangan tampak lebih baik daripada substansi ekonomi sebenarnya.

Klasifikasi liabilitas dan ekuitas merupakan elemen penting dalam akuntansi keuangan karena menentukan cara struktur modal perusahaan ditampilkan dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Menurut IAS 32 yang telah diadopsi dalam PSAK 50, liabilitas adalah instrumen keuangan yang mewajibkan perusahaan menyerahkan kas atau

aset keuangan kepada pihak lain, atau ketika perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari kewajiban tersebut (IASB, 2018). Sebaliknya, ekuitas dipahami sebagai klaim pemilik atas sisa aset setelah seluruh kewajiban diselesaikan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020).

Penentuan klasifikasi ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga memengaruhi berbagai indikator keuangan, seperti rasio solvabilitas, kecukupan modal, dan ukuran kesehatan perusahaan yang dipakai oleh investor, kreditor, maupun regulator. Tantangan muncul ketika instrumen keuangan bersifat ganda atau hybrid. Contohnya, saham preferen dengan dividen tetap sering dipandang sebagai liabilitas karena ada kewajiban pembayaran, tetapi sekaligus dianggap ekuitas karena merepresentasikan kepemilikan. Hal serupa terjadi pada obligasi konversi yang dapat dicatat sebagai liabilitas, ekuitas, atau kombinasi keduanya, bergantung pada karakteristik kontraknya (Barth & Landsman, 2018; Zhang & Andrew, 2019).

Dalam praktik, perbedaan kecil dalam ketentuan kontrak—seperti hak penebusan, opsi dividen kumulatif, atau mekanisme konversi—dapat menimbulkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Akibatnya, instrumen dengan substansi ekonomi yang sama bisa dilaporkan berbeda: satu sebagai liabilitas dan lainnya sebagai ekuitas. Kondisi ini memengaruhi rasio keuangan utama seperti leverage, return on equity (ROE), dan debt-to-equity ratio, yang menjadi acuan pasar dalam menilai risiko serta mengambil keputusan investasi (Hasymi & Garayuni, 2024).

Ketidakpastian tersebut menurunkan keterbandingan (*comparability*) laporan keuangan lintas perusahaan maupun negara. Investor kesulitan menilai kinerja secara konsisten, regulator terhambat dalam menciptakan pelaporan yang seragam, dan perusahaan berpeluang melakukan arbitrase akuntansi dengan merancang instrumen agar posisi keuangan tampak lebih baik daripada kondisi sebenarnya.

Situasi ini memperlihatkan bahwa standar yang ada, seperti IAS 32 dan PSAK 50, masih terbatas dalam mengatur instrumen keuangan hibrida. Ambiguitas klasifikasi tidak hanya melemahkan keandalan laporan, tetapi juga dapat menurunkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, reformasi klasifikasi liabilitas dan ekuitas diperlukan untuk memperjelas pemisahan instrumen, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan memperkuat daya saing pasar modal Indonesia dalam menghadapi konvergensi standar akuntansi global.

KAJIAN LITERATUR

A. Konsep Dasar Klasifikasi Liabilitas dan Ekuitas

Klasifikasi liabilitas dan ekuitas merupakan aspek penting dalam akuntansi keuangan karena menentukan bagaimana struktur modal perusahaan disajikan dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Berdasarkan IAS 32 yang diadopsi dalam PSAK 50, liabilitas adalah instrumen keuangan yang menimbulkan kewajiban kontraktual bagi perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak ketiga, atau ketika perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari kewajiban tersebut (IASB, 2018). Dengan kata lain, liabilitas mencerminkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas. Sebaliknya, ekuitas diartikan sebagai klaim residual pemilik setelah seluruh kewajiban diselesaikan, yaitu hak kepemilikan atas sisa aset perusahaan. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020), ekuitas juga mencerminkan posisi pemilik dalam menanggung risiko sekaligus memperoleh manfaat dari kinerja perusahaan.

Penentuan klasifikasi liabilitas dan ekuitas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak besar terhadap pengukuran rasio keuangan, pemenuhan struktur modal minimum, serta indikator kesehatan keuangan yang digunakan investor, kreditor, dan regulator. Permasalahan muncul ketika instrumen keuangan bersifat ganda atau hybrid. Misalnya, saham preferen dengan dividen tetap sering diperlakukan sebagai liabilitas karena ada kewajiban pembayaran dividen secara berkala, namun juga memiliki sifat ekuitas karena mencerminkan kepemilikan. Hal serupa berlaku pada obligasi konversi, yang dapat dicatat sebagai liabilitas, ekuitas, atau kombinasi keduanya, tergantung pada syarat kontrak dan fitur konversinya (Barth & Landsman, 2018; Zhang & Andrew, 2019).

Dalam praktiknya, perbedaan kecil dalam klausul kontrak seperti hak penebusan awal, opsi dividen kumulatif, atau mekanisme konversi tetap maupun variabel dapat menghasilkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Akibatnya, dua instrumen dengan substansi ekonomi serupa dapat dilaporkan berbeda dalam neraca: satu sebagai liabilitas, sementara yang lain sebagai ekuitas, hanya karena perbedaan teknis kontraktual. Kondisi ini berpengaruh terhadap rasio keuangan penting seperti leverage, return on equity (ROE), dan debt-to-equity ratio, yang digunakan pasar untuk menilai risiko serta pengambilan keputusan investasi (Hasymi & Garayuni, 2024).

Ketidakpastian klasifikasi ini menurunkan tingkat keterbandingan (comparability) laporan keuangan antarperusahaan maupun antaryurisdiksi. Investor dan analis pasar menghadapi kesulitan dalam mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan secara konsisten, sedangkan regulator mengalami hambatan dalam menciptakan pelaporan yang seragam. Situasi ini juga mendorong terjadinya arbitrase akuntansi, yaitu ketika perusahaan merancang instrumen keuangan untuk memanfaatkan kelemahan standar sehingga kondisi keuangan tampak lebih baik daripada substansi ekonomi sebenarnya.

B. Tujuan Dilakukan Reformasi Klasifikasi

Reformasi terkait klasifikasi liabilitas dan ekuitas diperlukan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada standar sebelumnya, seperti IAS 32 maupun adopsinya dalam PSAK 50. Meskipun standar tersebut telah memberikan kerangka konseptual mengenai perbedaan antara liabilitas dan ekuitas, kejelasannya masih terbatas dalam menangani instrumen keuangan yang bersifat kompleks atau hibrida, seperti saham preferen dengan dividen tetap, obligasi konversi, maupun instrumen derivatif melekat. Ketidakjelasan ini menimbulkan implikasi signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan ketepatan pengambilan keputusan ekonomi.

Tanpa adanya reformasi, terdapat beberapa konsekuensi besar yang dapat menghambat kredibilitas pelaporan keuangan:

- 1) **Kualitas pelaporan menurun**, Ketidakpastian klasifikasi menyebabkan informasi keuangan menjadi kurang relevan dan tidak mencerminkan substansi ekonomi instrumen keuangan. Investor kesulitan membedakan antara klaim yang bersifat kewajiban kontraktual dan klaim residual pemilik, sehingga keputusan investasi berisiko didasarkan pada informasi yang tidak akurat (Li, 2020).
- 2) **Risiko arbitrase akuntansi meningkat**, Perusahaan dapat merancang struktur instrumen keuangan agar terlihat lebih baik di neraca, misalnya dengan mengubah karakteristik kontrak sedikit saja sehingga suatu kewajiban dapat dilaporkan sebagai ekuitas. Hal ini mengakibatkan rasio keuangan seperti leverage atau return on equity (ROE) menjadi bias dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya (Christensen, Hail, & Leuz, 2020).
- 3) **Turunnya kepercayaan pasar modal**. Salah klasifikasi terhadap instrumen hibrida dapat menyebabkan penilaian yang keliru (mispricing) terhadap harga

saham, meningkatkan volatilitas pasar, serta menaikkan biaya modal perusahaan. Investor dan kreditur akan meminta premi risiko lebih tinggi ketika laporan keuangan dianggap tidak dapat diandalkan (Jiang & Kim, 2022).

- 4) **Ketidakselarasan lintas yurisdiksi**, Perbedaan interpretasi standar antara negara satu dengan yang lain menurunkan keterbandingan (*comparability*) laporan keuangan internasional. Akibatnya, investor global kesulitan mengevaluasi kinerja perusahaan lintas batas, dan pasar modal menjadi kurang efisien (Bischof, Brüggemann, & Daske, 2019).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, *International Accounting Standards Board (IASB)* menggagas proyek *Financial Instruments with Characteristics of Equity* (FICE). Proyek ini bertujuan menciptakan pedoman klasifikasi yang berbasis prinsip, lebih konsisten, transparan, dan informatif. Melalui pendekatan FICE, klaim terhadap entitas dinilai berdasarkan waktu jatuh tempo, jumlah yang pasti atau variabel, dan prioritas klaim dalam likuidasi.

C. Perbedaan Obligasi dan Obligasi Konversi

Obligasi merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah untuk memperoleh pendanaan jangka menengah hingga panjang. Instrumen ini mewajibkan penerbit membayar bunga (kupon) secara periodik dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Pemegang obligasi hanya berstatus sebagai kreditur sehingga tidak memiliki hak kepemilikan atas perusahaan. Menurut Fabozzi (2012), obligasi termasuk instrumen pendapatan tetap (*fixed income*) yang relatif aman karena memberikan arus kas pasti berupa bunga dan pengembalian pokok.

Berbeda dengan obligasi biasa, obligasi konversi memiliki sifat hibrida karena selain berfungsi sebagai instrumen utang, obligasi ini juga memberikan opsi kepada pemegangnya untuk menukarkannya menjadi saham perusahaan pada harga dan waktu tertentu. Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020) menegaskan bahwa karakteristik ganda tersebut menimbulkan dilema akuntansi, sebab obligasi konversi dapat diperlakukan sebagai liabilitas, ekuitas, atau kombinasi keduanya tergantung substansi kontrak. Bodie, Kane, dan Marcus (2014) menambahkan bahwa obligasi konversi biasanya memberikan bunga lebih rendah dibanding obligasi biasa, namun menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi apabila hak konversi digunakan saat harga saham meningkat.

Dengan demikian, perbedaan antara obligasi dan obligasi konversi terletak pada adanya hak konversi menjadi saham. Obligasi biasa hanya mencerminkan hubungan utang-piutang antara penerbit dan investor, sedangkan obligasi konversi memberikan kesempatan bagi investor untuk berubah posisi dari kreditur menjadi pemilik saham.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian	Relevansi Topik
1.	Capital Structure Models and Contingent Convertible Securities. <i>Risks</i> , Vol. 12, No. 3, 2024, hlm. 55.	Meng, D., Metzler, A., & Reesor, R. M. (2024)	Instrumen convertible contingent berpengaruh pada struktur modal, leverage, dan biaya modal perusahaan.	Memberi gambaran bahwa instrumen hibrida menimbulkan implikasi langsung terhadap permodalan dan pengukuran rasio keuangan.
2.	Determinants of the issuance of hybrid securities by insurers from the perspective of IAS 32. <i>Revista Contabilidade & Finanças</i> .	Paisano, B., Flores, E., & Salotti, B. M. (2025)	Penerbitan instrumen hibrida dipengaruhi faktor ukuran aset, leverage, biaya modal, dan kondisi pasar.	Menguatkan pentingnya regulasi IAS 32/FICE dalam menentukan perlakuan instrumen hibrida lintas industri.
3.	Analisis Yuridis Penetapan Suku Bunga Obligasi Konversi Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Start-Up di Indonesia. <i>Res Judicata</i> 1.5(2).100–109	Nugroho, H. F. (2023)	Menemukan bahwa penetapan suku bunga obligasi konversi di Indonesia belum diatur proporsional sehingga menimbulkan bias.	Memberikan gambaran praktik dan keterbatasan regulasi instrumen hibrida di Indonesia.
4.	Konsep Aset, Liabilitas dan Ekuitas. <i>Ecotax</i> , Vol. 3, No. 2, 2025.	Simanjuntak, C. R., Zega, O. F., Silaban, M., Balen, J., & Putri Aruan (2025)	Menjelaskan definisi aset, liabilitas, dan ekuitas serta keterkaitannya dalam laporan keuangan.	Memberikan landasan konseptual dasar untuk membedakan liabilitas dan ekuitas.
5.	A Unifying Approach for the Pricing of Debt Securities. <i>arXiv preprint</i> .	Vachon, M.-C., & Mackay, A. (2024)	Menyajikan kerangka penilaian obligasi (termasuk convertible bonds) yang memasukkan risiko kredit dan bunga.	Memberikan kontribusi pada aspek pengukuran dan valuasi, yang berimplikasi pada kejelasan pemisahan liabilitas dan ekuitas.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan narrative review untuk menelusuri dan mensintesis literatur yang relevan terkait isu klasifikasi liabilitas dan ekuitas. Sumber literatur diperoleh melalui basis data akademik internasional, seperti Scopus, Web of Science, dan ScienceDirect, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Proses penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci antara lain “liability-equity classification,” “hybrid instruments accounting,” “IFRS IAS 32 reform,” “financial reporting quality,” dan “equity versus debt.” Literatur yang dianalisis dibatasi pada publikasi tahun 2015 hingga 2025 yang berfokus pada permasalahan klasifikasi instrumen keuangan.

Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, perdebatan akademik, dan arah perkembangan penelitian terkini. Literatur yang digunakan mencakup artikel konseptual, penelitian empiris lintas negara, laporan standar internasional, serta kajian mengenai pengaruh kebijakan akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan investor. Melalui metode ini, kajian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika klasifikasi liabilitas dan ekuitas sekaligus memetakan arah reformasi standar yang sedang berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Reformasi: Pendekan ICE IASB

Proyek Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE) yang digagas oleh International Accounting Standards Board (IASB) bertujuan memperbaiki kelemahan kerangka lama (IAS 32) dalam mengklasifikasikan instrumen keuangan yang memiliki karakteristik campuran antara liabilitas dan ekuitas. Instrumen seperti obligasi konversi, saham preferen dengan hak tebus, dan derivatif melekat sering kali sulit ditentukan apakah termasuk liabilitas, ekuitas, atau kombinasi keduanya.

FICE mengusulkan kerangka baru untuk mengklasifikasikan klaim terhadap entitas berdasarkan tiga dimensi utama:

- 1) **Waktu Jatuh Tempo (*Timing*)**, menilai apakah entitas memiliki kewajiban kontraktual untuk membayar kas atau menyerahkan aset keuangan pada jangka pendek, menengah, atau panjang, instrumen yang memiliki tanggal jatuh tempo tetap cenderung digolongkan sebagai liabilitas, sedangkan instrumen tanpa kewajiban pembayaran tetap atau jatuh tempo jelas cenderung diklasifikasikan sebagai ekuitas

sebagai contohnya, obligasi dengan kewajiban pembayaran bunga tetap hingga jatuh tempo → liabilitas, saham biasa tanpa kewajiban pembayaran dividen → ekuitas.

- 2) **Jumlah yang Pasti (*Amount*)**, menilai apakah jumlah pembayaran bersifat tetap atau tergantung pada kinerja entitas, jika jumlah pembayaran pasti (*fixed amount*), instrumen lebih sesuai diklasifikasikan sebagai liabilitas karena entitas tidak dapat menghindari arus kas keluar, jika jumlah pembayaran bergantung pada laba atau arus kas entitas (*contingent*), maka klaim tersebut lebih dekat dengan ekuitas, karena pemilik menanggung risiko dan imbal hasil residual.
- 3) **Prioritas Klaim (*Priority*)**, menilai posisi instrumen dalam likuidasi atau pembubaran entitas, klaim yang memiliki prioritas lebih tinggi untuk menerima pembayaran sebelum pemegang saham biasa biasanya diperlakukan sebagai liabilitas, sebaliknya, klaim residual yang hanya menerima pembagian setelah semua kewajiban terpenuhi diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Proses reformasi klasifikasi dimulai sejak 2018, ketika IASB menerbitkan Consultation Paper yang menguraikan isu utama dan kemungkinan solusi dalam kerangka FICE. Proses ini meliputi, diskusi dan masukan publik (*public discussion*) dari regulator, akademisi, penyusun laporan keuangan, dan investor untuk menguji kejelasan konsep, uji kelayakan lintas yurisdiksi (*field testing*) guna menilai dampak implementasi standar baru pada negara dengan tingkat kematangan pasar modal berbeda (Nobes, 2020). Revisi berkelanjutan untuk mengakomodasi umpan balik dan menyelaraskan dengan IFRS lainnya, seperti IFRS 9 (Instrumen Keuangan) dan IFRS 13 (Pengukuran Nilai Wajar).

Dalam konteks Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menyiapkan revisi PSAK 50 agar selaras dengan perkembangan standar internasional (Gudio, 2024). Penyesuaian ini mencakup, perbaikan definisi liabilitas dan ekuitas sesuai kerangka fice, panduan teknis pemisahan komponen liabilitas dan ekuitas pada instrumen majemuk, penekanan pada transparansi pengungkapan agar investor dapat menilai dampak konversi, penebusan, dan potensi risiko arus kas.

B. Penerapan Reformasi Dalam Praktik

Reformasi klasifikasi liabilitas dan ekuitas bukan sekadar kewajiban normatif atau pemenuhan ketentuan formal standar akuntansi, tetapi merupakan kebutuhan praktis yang

berdampak langsung pada cara perusahaan menyusun, menyajikan, dan mengungkapkan laporan keuangannya. Kompleksitas instrumen keuangan modern seperti saham preferen dengan fitur penebusan, obligasi konversi, dan derivatif melekat membuat standar lama sering kali gagal mencerminkan substansi ekonomi transaksi secara tepat. Oleh karena itu, penerapan standar baru yang terintegrasi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis.

Standar akuntansi yang selaras dengan IFRS memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya memenuhi aturan lokal, tetapi juga relevan bagi investor global, dapat dipercaya oleh kreditor, serta konsisten dan dapat diperbandingkan lintas negara. Konvergensi ini memungkinkan informasi keuangan mencerminkan posisi dan kinerja perusahaan secara lebih akurat, memperkuat transparansi, mengurangi risiko salah tafsir, dan meningkatkan kepercayaan pasar modal. Dengan kata lain, reformasi ini merupakan fondasi untuk menjaga daya saing pasar keuangan Indonesia di tengah integrasi ekonomi global dan arus investasi lintas batas yang semakin dinamis.

1) Penyesuaian Pada Standar Nasional

Indonesia perlu melakukan konvergensi penuh PSAK dengan IFRS terbaru, khususnya dengan standar hasil proyek Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE) yang sedang digarap IASB. Penyesuaian ini mencakup beberapa aspek kunci:

- a) Revisi definisi liabilitas dan ekuitas dalam PSAK 50, definisi harus lebih menekankan substansi ekonomi daripada bentuk hukum kontrak, perlu pembaruan agar instrumen keuangan hibrida tidak lagi diklasifikasikan secara ambigu, melainkan berdasarkan kriteria waktu, jumlah, dan prioritas klaim.
- b) Pedoman pemisahan instrumen majemuk (compound instruments), PSAK harus menyediakan *guidance* yang rinci tentang pemisahan komponen liabilitas dan ekuitas pada pengakuan awal. Misalnya, obligasi konversi harus dipecah menjadi dua: bagian liabilitas (biaya bunga) dan bagian ekuitas (opsi konversi). Pendekatan ini akan mengurangi distorsi pada rasio leverage dan ROE.
- c) Peningkatan kualitas pengungkapan (disclosure), perusahaan harus menjelaskan risiko konversi, potensi dilusi kepemilikan, dan dampak terhadap arus kas masa depan, *enhanced disclosure* juga mencakup sensitivitas nilai

wajar instrumen terhadap perubahan suku bunga, nilai tukar, atau harga saham. Langkah ini akan meningkatkan pemahaman investor tentang sifat instrumen keuangan kompleks (Harahap, 2023).

- d) Penyesuaian regulasi pendukung, Konvergensi PSAK harus selaras dengan regulasi OJK, BEI, dan BI agar tidak menimbulkan konflik kepatuhan, diperlukan pedoman transisi untuk mengurangi beban adaptasi bagi entitas pelapor.

2) Dampak Bagi Perusahaan

Penerapan standar baru akan memberikan dampak ganda bagi perusahaan dimana dampak Positif terdiri dari, kejelasan laporan keuangan meningkat, investor dan kreditor lebih mudah memahami struktur modal karena klasifikasi instrumen keuangan menjadi konsisten dan informatif, akses pendanaan lebih mudah, laporan yang transparan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dan pasar modal, sehingga menurunkan cost of capital (Li & Wang, 2021), kredibilitas tata kelola lebih kuat, penerapan standar internasional mendukung praktik good corporate governance dan memperkuat reputasi perusahaan di tingkat global.

Dampak Negatif / Tantangan Implementasi seperti, biaya implementasi lebih tinggi, perusahaan harus melakukan penyesuaian sistem akuntansi, pembaruan kebijakan, dan audit tambahan, kebutuhan sumber daya manusia akuntansi yang kompeten, staf keuangan memerlukan pelatihan intensif untuk memahami standar baru, terutama terkait pemisahan instrumen majemuk dan pengungkapan risiko (Miller & Power, 2021). Potensi volatilitas angka laporan keuangan pada masa transisi, perubahan klasifikasi dapat memengaruhi rasio keuangan jangka pendek sehingga menuntut komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan.

3) Dampak Bagi Investor dan Pasar Modal

Reformasi klasifikasi liabilitas dan ekuitas membawa dampak strategis bagi investor dan ekosistem pasar modal, transparansi yang lebih tinggi (laporan keuangan yang mengikuti kerangka FICE meminimalkan risiko salah tafsir terhadap instrumen keuangan kompleks, investor dapat membedakan dengan jelas instrumen yang benar-benar mencerminkan klaim residual (ekuitas) versus instrumen dengan kewajiban), keterbandingan laporan keuangan meningkat (standar yang seragam di tingkat global mempermudah analisis lintas negara dan lintas industri, sehingga meningkatkan

efisiensi alokasi modal di pasar modal internasional). Perlindungan investor lebih kuat (klasifikasi yang berbasis substansi ekonomi membantu memastikan bahwa instrumen dengan risiko setara diperlakukan secara akuntansi yang setara, hal ini mengurangi peluang arbitrase kontrak yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan pemodal publik (Bischof et al., 2019). Peningkatan kepercayaan pasar (konsistensi pelaporan menurunkan asimetri informasi antara manajemen dan investor, sehingga memperbaiki penilaian harga saham dan menurunkan biaya modal).

C. Risiko Jika Reformasi Tidak Dilakukan

Jika reformasi klasifikasi liabilitas dan ekuitas tidak segera diterapkan, berbagai dampak negatif yang serius dapat terjadi baik pada tingkat perusahaan, pasar modal, maupun perekonomian nasional secara umum. Risiko-risiko utama yang perlu dicermati antara lain:

- 1) Peningkatan Mispricing Saham dan Volatilitas Pasar, ketidakjelasan klasifikasi instrumen keuangan, seperti saham preferen atau obligasi konversi, dapat menyesatkan investor dalam menilai kinerja dan risiko perusahaan. Hal ini berpotensi menyebabkan mispricing saham, yaitu harga saham tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Mispricing yang berulang dapat memperburuk volatilitas pasar modal, membuat harga saham berfluktuasi tajam bukan karena perubahan ekonomi riil, melainkan akibat informasi keuangan yang kurang andal (Jiang & Kim, 2022).
- 2) Turunnya Daya Saing Pasar Modal Indonesia, keterlambatan dalam mengadopsi standar akuntansi internasional, khususnya IFRS terbaru melalui proyek FICE, berpotensi menurunkan daya saing pasar modal Indonesia. Investor global cenderung memilih pasar dengan laporan keuangan yang transparan, relevan, dan dapat dibandingkan lintas negara. Jika Indonesia tidak segera melakukan konvergensi PSAK, risiko terjadinya capital flight atau aliran dana investasi ke negara lain yang lebih transparan akan meningkat.
- 3) Ketidaksesuaian dengan Basel III dan Regulasi Prudensial Perbankan, standar Basel III menuntut perbankan dan lembaga keuangan untuk memiliki modal inti (tier 1 capital) yang kuat dan dapat diandalkan. Namun, klasifikasi modal inti sangat dipengaruhi oleh perlakuan akuntansi instrumen keuangan. Tanpa pembaruan

- standar, bank di Indonesia dapat mengalami perbedaan interpretasi dalam menghitung modal inti, yang pada gilirannya memicu risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi prudensial internasional dan dapat mengurangi kepercayaan regulator maupun pasar (Ahmad, 2024).
- 4) Penurunan Kualitas Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance), pelaporan keuangan yang tidak akurat akibat klasifikasi liabilitas dan ekuitas yang ambigu berisiko melemahkan tata kelola perusahaan. Informasi yang kurang jelas dapat, menyulitkan dewan komisaris dan pemegang saham dalam melakukan pengawasan yang efektif, memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan arbitrase akuntansi demi mempercantik laporan keuangan, sehingga transparansi dan akuntabilitas berkurang, mengurangi kepercayaan pemegang saham minoritas serta merusak reputasi perusahaan di mata investor global.

D. Dampak Reformasi

1) Dampak Teoritis

Reformasi klasifikasi liabilitas dan ekuitas memperkuat kerangka konseptual International Financial Reporting Standards (IFRS), terutama dalam dua karakteristik kualitatif utama laporan keuangan, Faithful Representation (Representasi yang andal), reformasi memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomi dari instrumen keuangan, bukan hanya bentuk hukumnya. Instrumen hibrida, seperti obligasi konversi atau saham preferen dengan kupon tetap, akan diperlakukan sesuai hakikat ekonominya. Hal ini mengurangi distorsi informasi dan membantu pengguna laporan dalam menilai risiko dan kinerja entitas secara lebih tepat (Barth & Landsman, 2018). Relevance (Relevansi informasi), informasi yang dihasilkan menjadi lebih berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Investor, kreditor, dan regulator akan menerima informasi yang tepat waktu, konsisten, dan berorientasi masa depan, sesuai prinsip decision usefulness.

Dengan demikian, laporan keuangan menjadi alat prediksi yang lebih akurat mengenai arus kas dan prospek entitas (Christensen, Hail, & Leuz, 2020). Secara teoritis, reformasi ini memperkuat koherensi standar akuntansi global, meningkatkan keterbandingan antar yurisdiksi, serta mendukung penelitian akademik mengenai kualitas pelaporan keuangan yang berbasis IFRS.

2) Dampak Praktis

Reformasi dalam klasifikasi liabilitas dan ekuitas membawa dampak penting bagi perusahaan, investor, dan pasar modal. **Pertama**, reformasi ini membantu menurunkan biaya pendanaan karena laporan keuangan yang lebih jelas dan konsisten meningkatkan kepercayaan investor serta mengurangi ketidakpastian informasi. Dengan begitu, risiko yang dipersepsikan lebih rendah sehingga tingkat keuntungan yang diminta investor maupun bunga pinjaman dari kreditor ikut menurun. Misalnya, perusahaan dengan instrumen keuangan hibrida yang diklasifikasikan secara tepat dapat lebih mudah menerbitkan saham atau obligasi baru dengan biaya lebih murah (Li & Wang, 2021). **Kedua**, reformasi ini dapat meningkatkan peringkat kredit perusahaan. Lembaga pemeringkat sangat bergantung pada kejelasan posisi liabilitas dan ekuitas untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Jika laporan keuangan menggambarkan kondisi sebenarnya, maka rasio utang, kemampuan membayar bunga, dan indikator risiko lainnya akan lebih akurat. Hal ini membuat perusahaan berpeluang mendapatkan peringkat kredit yang lebih baik (Jiang & Kim, 2022). **Ketiga**, reformasi juga memperkuat akuntabilitas manajemen melalui keterbukaan informasi. Aturan klasifikasi yang jelas membatasi peluang manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan hanya demi memperindah neraca. Transparansi ini juga mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik karena perusahaan wajib menjelaskan risiko konversi, potensi dilusi kepemilikan, serta prioritas klaim investor secara terbuka (Bischof, Brüggemann, & Daske, 2019).

Secara umum, reformasi ini tidak hanya memperkuat dasar konseptual IFRS yang menekankan keandalan dan relevansi informasi, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih efisien, transparan, dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan daya tarik pasar modal di mata investor global.

Instrumen keuangan hibrida, seperti saham preferen dan obligasi konversi, menjadi tantangan utama dalam menentukan apakah suatu instrumen dicatat sebagai liabilitas atau ekuitas. Sifat gandanya menimbulkan ambiguitas yang berpengaruh pada laporan keuangan dan rasio penting, seperti leverage, debt-to-equity ratio, dan ROE. Ketidakpastian perlakuan akuntansi ini mengurangi kejelasan informasi dan bisa menyesatkan investor (Barth & Landsman, 2018; Li, 2020). Selain itu, perbedaan

penerapan IAS 32 dan PSAK 50 antarnegara menurunkan keterbandingan laporan keuangan, sehingga menyulitkan investor dalam menilai kinerja secara konsisten (Perera & Tan, 2021).

Standar berbasis prinsip seperti IAS 32 memang fleksibel, tetapi juga memberi ruang subjektivitas tinggi. Klasifikasi sering didasarkan pada bentuk hukum kontrak, bukan substansi ekonomi, sehingga perusahaan bisa merancang instrumen agar tampak lebih menguntungkan dengan menggeser kewajiban menjadi ekuitas. Dampaknya, salah klasifikasi dapat menyebabkan kesalahan harga saham, volatilitas pasar meningkat, dan melemahkan efisiensi pasar (Jiang & Kim, 2022).

Untuk menjawab hal ini, IASB mengembangkan proyek Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE). Pendekatan baru menilai klaim keuangan dari tiga sisi: jatuh tempo, kepastian jumlah kewajiban, dan prioritas klaim saat likuidasi. Dengan cara ini, pemisahan liabilitas dan ekuitas lebih jelas, manipulasi kontrak berkurang, dan konsistensi laporan antarnegara meningkat (Christensen, Hail, & Leuz, 2020). Namun, penerapannya tidak mudah karena menuntut biaya kepatuhan tinggi, pembaruan sistem, pelatihan akuntan, serta kesiapan yang berbeda-beda di tiap negara (Miller & Power, 2021; Nobes, 2020).

Secara teori, reformasi ini memperkuat kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan keandalan dan relevansi, sehingga informasi lebih berguna untuk memprediksi arus kas dan mendukung keputusan investasi. Secara praktik, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan investor lebih tinggi, biaya modal lebih rendah, serta reputasi tata kelola yang lebih baik, meski harus menanggung biaya implementasi yang besar. Bagi investor, reformasi meningkatkan transparansi, mengurangi asimetri informasi, dan memperkuat perlindungan pemegang saham minoritas.

Jika reformasi tidak segera diterapkan, risikonya cukup serius. Klasifikasi yang tidak jelas bisa menimbulkan salah harga saham, meningkatkan ketidakstabilan pasar, dan membuat pasar modal Indonesia kalah bersaing dengan negara yang lebih cepat mengadopsi standar internasional. Selain itu, ketidaksesuaian dengan aturan global, seperti Basel III di sektor perbankan, dapat memicu masalah kepatuhan dan membuka peluang arbitrase akuntansi.

Dengan demikian, masalah klasifikasi liabilitas dan ekuitas bukan sekadar teknis, tetapi memiliki dampak besar bagi teori, praktik, dan stabilitas ekonomi. Reformasi

melalui proyek FICE merupakan langkah penting untuk memperjelas klasifikasi, meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat kepercayaan pasar, dan mendorong efisiensi pasar modal global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa instrumen keuangan hibrida seperti saham preferen dan obligasi konversi sering menimbulkan masalah dalam menentukan klasifikasi antara liabilitas dan ekuitas. Sifat gandanya menyebabkan ambiguitas yang berpengaruh pada laporan keuangan, rasio penting seperti leverage dan ROE, serta menurunkan keterbandingan laporan antarperusahaan maupun antarnegara. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan investor dalam menilai kinerja perusahaan, tetapi juga membuka peluang terjadinya arbitrase akuntansi yang dapat membuat posisi keuangan terlihat lebih baik daripada kenyataan sebenarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, IASB memperkenalkan proyek Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE) yang menilai klaim keuangan berdasarkan jatuh tempo, kepastian jumlah, dan prioritas klaim. Reformasi ini diharapkan dapat memperjelas pemisahan antara liabilitas dan ekuitas, mengurangi manipulasi kontrak, serta meningkatkan konsistensi pelaporan lintas negara. Secara teori, langkah ini memperkuat keandalan dan relevansi laporan keuangan, sedangkan secara praktik dapat meningkatkan transparansi, menurunkan biaya modal, memperbaiki reputasi tata kelola perusahaan, serta memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, S. (2024). Akuntansi untuk Instrumen Keuangan Kompleks. Musytari: Neraca (Jurnal Akuntansi), 11(11). <https://doi.org/10.8734/musytari.v11i11.8426>
- Andriani, R. (2021). Konvergensi PSAK dengan IFRS: Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), 12(2), 345–356.
- Anggraini, D., & Susanto, Y. (2020). Analisis Implementasi PSAK 71 pada Perusahaan Perbankan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 17(1), 45–62.
- Arum, DP (2022). Tantangan Penerapan PSAK 71 dalam Industri Perbankan Syariah. Jurnal Akuntansi Syariah, 6(2), 101–115.
- Barth, M. E., & Landsman, W. R. (2018). Using fair value accounting for financial instruments. Accounting Horizons, 32(4), 1–20.
- Bischof, J., Brüggemann, U., & Daske, H. (2019). Fair value accounting and information asymmetry. Review of Accounting Studies, 24(3), 859–894.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, AJ (2014). Investasi (edisi ke-10). McGraw-Hill Education

- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2020). Adoption of IFRS standards and capital market effects. *Journal of Accounting Research*, 58(2), 547–603.
- Dewan Standar Akuntansi Internasional. (2018). IAS 32: Instrumen Keuangan—Penyajian. Yayasan IFRS.
- Dewi, FA, & Putra, IW (2021). Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Transparansi Laporan Keuangan Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 50–60.
- Fabozzi, FJ (2012). *Pasar Obligasi, Analisis, dan Strategi* (edisi ke-8). Pearson Education.
- Fitriani, A., & Lestari, N. (2023). Implementasi PSAK 50 dan 55: Dampak terhadap Penyajian Instrumen Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, 27(2), 133–145.
- Flores, E., Broedel, A., Carvalho, N., & Fasan, M. (2019). Financial Instruments with Characteristics of Equity: Determinants and Consequences of Accounting Classification. *Accounting in Europe*, 3, 169–185.
- Gudio, H. T. (2024). Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(3), 35–39. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.474>
- Gunawan, B., & Pramono, H. (2022). Evaluasi Pengungkapan Instrumen Keuangan Menurut PSAK 60 pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(3), 210–225.
- Handayani, M. (2020). Pengaruh Adopsi IFRS terhadap Kualitas Audit di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Aset (JAAA)*, 3(2), 85–97.
- Harahap, R. H. (2023). Penerapan PSAK 71 di Indonesia. *Global Journal of Economics and Accounting (GIJEA)*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.38035/gijea.v1i2.42>
- Haryanto, S. (2021). Instrumen Keuangan Hibrida dalam Perspektif PSAK 50 dan PSAK 55. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 12–24.
- Hasina Tazkiya, S.Ak., M.Ak., dkk. (2024). Akuntansi Keuangan Menengah 1 (Berbasis IFRS). PT Samudra Solusi Profesional.
- Hasymi, M., & Garayuni, L. (2024). Relevansi Nilai Hirarki Nilai Wajar dalam IFRS 13. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, 28(1), 1–16. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol28.iss1.art1>
- IFRS Foundation. (2025). Financial Instruments with Characteristics of Equity – Exposure Draft & IASB Redeliberations.
- Indrawati, L. (2020). Reformasi Standar Akuntansi Keuangan dan Implikasinya terhadap Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 145–158.
- Jiang, W., & Kim, J. (2022). Misclassification of hybrid financial instruments. *Journal of Corporate Finance*, 72, 102153.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., dkk. (2023). Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS (Edisi ke-4). IAI.
- Karyawati, G., & Saat, S. (Ed.). (2024). *Akuntansi Keuangan Lanjutan (IFRS)*. Erlangga.
- Kieso, DE, Weygandt, JJ, & Warfield, TD (2020). *Akuntansi Intermediate* (edisi ke-17). Wiley.
- Kurniawan, T. (2021). Penerapan PSAK 71: Studi pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 55–70.
- Lestari, A., & Hidayat, R. (2023). Dampak Konvergensi IFRS terhadap Relevansi Nilai Laba Perusahaan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 77–90.
- Li, X., & Wang, Y. (2021). Investor confidence and IFRS reform. *International Review of Financial Analysis*, 77, 101843.

- Li, Y. (2020). Hybrid instruments and financial reporting quality. *Accounting Research Journal*, 33(1), 1–15.
- Lubis, A., & Nasution, R. (2022). Analisis Perbedaan Perlakuan Akuntansi Instrumen Keuangan Menurut PSAK dan IFRS. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 22(1), 101–113.
- Marpaung, D. (2021). Penerapan PSAK 71: Tantangan Bagi Industri Keuangan Non-Bank. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 22(3), 389–403.
- Maulana, H. (2020). Akuntansi Instrumen Derivatif dan Implikasi PSAK 55. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 177–189.
- Miller, P., & Power, M. (2021). Accounting, Organizations and Society: Standard-setting challenges. *Accounting, Organizations and Society*, 96, 101226.
- Muchlis, M. (2020). Konvergensi IFRS dalam PSAK: Peluang dan Tantangannya. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Perbankan (JEMP)*, 4(2). <https://doi.org/10.35384/jemp.v4i2.133>
- Nobes, C. (2020). International harmonisation of accounting standards. *Abacus*, 56(4), 451–479.
- Perera, H., & Tan, LM (2021). Perbandingan lintas negara atas laporan keuangan IFRS: Masalah dan prospek. *Advances in Accounting*, 52, 100511. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2021.100511>
- Putri, M. A., & Santosa, E. (2023). Pengaruh Implementasi PSAK 71 terhadap Manajemen Risiko Kredit. *Jurnal Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 5(1), 45–58.
- Rahmawati, I. (2021). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: Dari PSAK ke IFRS. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 120–132.
- Ramadhani, N., & Siregar, R. (2022). Instrumen Keuangan Hibrida: Kajian atas PSAK 50 dan PSAK 71. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 13(1), 67–80.
- Sari, W. N. (2020). Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Komparabilitas Laporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 9(2), 90–104.
- Satriawan Surya, R. A. (2012). Akuntansi Keuangan Versi IFRS+. *Graha Ilmu*.
- Setiawan, B., & Rahayu, T. (2021). Peran PSAK 71 dalam Peningkatan Transparansi Laporan Keuangan Bank. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 15(1), 33–47.
- Sitanggang, et al. (2020). Analisa penerapan PSAK 71 pada perbankan syariah dan dampaknya terhadap cadangan kerugian penurunan nilai.
- Suroso, R., & Pratama, A. (2023). Analisis Perbedaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit Menurut PSAK 55 dan PSAK 71. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 9(3), 819–827. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1126>
- Yuliani, D., & Sihombing, F. (2022). Analisis Penerapan PSAK 50, 55, dan 60 dalam Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(2), 88–101
- Yunita, A. P. (2022). Implementasi PSAK 71 pada Bank Jateng: Penyesuaian CKPN dan klasifikasi aset/ liabilitas. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 3(1), 15–26.
- Zhang, L., & Andrew, J. (2019). Accounting for convertible instruments: A review. *Australian Accounting Review*, 29(1), 100–115.